

BAB II

LANDASAN TEORI

F. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Dyan Puspitaningsih, Dida Rahmadanik dan Adi Soesiantoro (2025)**
Jurnal dengan judul “Evaluasi Penyelenggaraan Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Loak Dupak Rukun Surabaya” Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Daniel Stufflebeam & Coryn sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penertiban telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan lingkungan sekitar pasar karena pedagang kaki lima bersikap kooperatif. Koordinasi yang baik antara PD Pasar Surya dan Satpol PP baik ditingkat Kota maupun kecamatan, pendekatan persuasif kepada pedagang, serta mendukung efektifitas kebijakan ini. Disisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa masih terdapat hambatan yang perlu diatasi guna meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan. Hambatan tersebut antara lain adalah kekhawatiran pedagang akan kehilangan pelanggan karena relokasi, kondisi pasar yang masih dalam tahap penyesuaian menyebabkan sebagian pedagang mengalami tantangan dalam memenuhi kewajiban sewa stand baru, ketidakstabilan pendapatan pedagang, serta kecenderungan sebagai pedagang untuk tetap memilih lokasi lama yang dirasakan lebih strategis dan mudah dijangkau pengunjung.

2. **Siti Rahmah (2023) dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Hanyar Kelurahan Barabai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah” Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.** Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Evaluasi Program Kebijakan Penertiba Pedagang Kaki Lima di pasar hanyar kelurahan Barabai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggunakan teori tentang evaluasi menurut Eny winarti, dkk. Dengan sebuah singkatan yaitu model CIPP yaitu Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*), Evaluasi masukan (*Input Evalution*), Evaluasi Proses (*Process Evalution*), dan evaluasi produk (*Product Evaluation*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi konteks meliputi indikator kekuatan pelaksanaan sudah baik karena adanya landasan hukum tentang peraturan ketertiban dan ketentraman masyarakat pada pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dan indikator kelemahan pelaksanaan kurang baik karena Peraturan Daerah ada tetapi tidak dilaksanakan terutama masalah sanksi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 pada pasal 69 kepada para pedagang yang melanggar Peraturan Daerah.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No (1)	Peneliti (2)	Judul (3)	Hasil (4)	Persamaan (5)	Perbedaan (6)
1.	Dyan Puspitaningsih Dida Rahmadanik dan Adi Soesiantoro (2025) Jurnal dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.	Evaluasi Penyelenggara Ketertiban Umum Pada Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Loak Dupak Rukun Surabaya.	Hasil evaluasi model CIPP adalah kebijakan ini dapat dikatakan efektif dalam terciptanya ruang kota yang lebih teratur dan penertiban pedagang kaki lima di kawasan pasar loak dupak rukun surabaya telah memberikan kontribusi positif terhadap ketertiban ruang publik.	Menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Perbedaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari lokasi penelitian yang berbeda, teori dari Daniel Stuffelebea m & Coryn dan fokus membahas kebijakan penertiban pedagang kaki lima serta koordinasi antar PD Pasar Surya dan Satpol PP. Sedangkan dalam penelitian saya dengan teori William N Dunn dan fokus membahas evaluasi penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Siti Rahmah (2023) skripsi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai	Evaluasi Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Hanyar Kelurahan Barabai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Secara keseluruhan evaluasi pelaksanaan ketertiban umum dan ketentrama masyarakat pada pedagang kaki lima di pasar hanyar bisa dikatakan cukup baik karena masih adanya kekurangan dan kelemahan dalam pemberian sanksi terhadap para pedagang yang melanggar peraturan daerah.	Menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Perbedaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari lokasi penelitian yang berbeda, teori dari Eny winarti, dkk. Fokus membahas Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan sanksi terhadap pedagang kaki lima yang melanggar aturan. Sedangkan dalam penelitian saya dengan teori William N Dunn dan fokus membahas evaluasi penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan.

G. Tinjauan Teoritis

1. Evaluasi

a. Pengertian Evaluasi

Dari segi bahasa evaluasi berasal dari kata bahasa Inggris “*evaluation*” yang diserap dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “evaluasi” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah.

Evaluasi program adalah kegiatan atau upaya untuk memperoleh informasi mengenai program yang dilaksanakan untuk menilai sejauh mana kegiatan tersebut telah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan kemudian untuk mengetahui keputusan apa yang dapat diambil terkait dengan penilaian yang telah dilakukan. Evaluasi program dilaksanakan menggunakan metode penelitian sistematis.

Ralph Tyler (dalam Firyal Akbar 2018:9) yang dikenal sebagai yang pertama kali mengembangkan teori evaluasi modern mengungkapkan bahwa *Evaluation is the process of determining to what extent the educational objectives are actually being realized*, ia mengungkapkan bahwa evaluasi adalah sebuah proses untuk menentukan sejauh mana tujuan pendidikan bisa terealisasi.

Pendapat Peter H Rossi dan Howard E Freeman (dalam Firyal Akbar 2018:10) mengungkapkan bahwa *evaluation research is a systematic application of social research procedures in assessing the conceptualization and design, implementation, and unity of social intervention programs*, mereka menjelaskan bahwa penelitian evaluasi adalah sebuah aplikasi prosedur penelitian sosial yang sistematis dalam menilai konseptualisasi dan perancangan, implementasi, dan kesatuan program intervensi sosial.

Cook dan Schioli (dalam Rantung 2024:15) evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasilkebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Secara umum Dunn (dalam Firyal Akbar, 2018:18) menjelaskan mengenai indikator-indikator dalam melakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni sebagai berikut:

- 1) *Efektifitas*; apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
- 2) *Efesiensi*; seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
- 3) *Kecukupan*; seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?

- 4) *Perataan*; apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
- 5) *Responsivitas*; apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
- 6) *Ketepatan*; apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sedangkan menurut Sutjipta (dalam Muhammad Sawir, 2021:201-202) ada lima ciri evaluasi, meliputi:

- 1) Kualitas: apakah program baik atau tidak baik
 - 2) Kesesuaian: pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat
 - 3) Keefektifan: seberapa jauh tujuan tercapai
 - 4) Efisiensi: Penggunaan sumber daya yang baik
 - 5) Kegunaan: Kegunaan bagi masyarakat
- b. Langkah-langkah dalam Evaluasi
- Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan *margin* kesalahan yang minim perlu adanya langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni:
- 1) Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
 - 2) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
 - 3) Deskripsi dan standarisasi kegiatan.
 - 4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.
 - 5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
 - 6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

c. Karakteristik Evaluasi

Menurut Dunn (dalam Hayat 2018:38-39), evaluasi kebijakan mempunyai karakter yang dapat dibedakan dengan lainnya, yaitu:

1) Fokus Nilai

Evaluasi sebagai esensi dan nilai terhadap program kegiatan atau agenda kebijakan. Bukan hanya sebagai usaha untuk mengumpulkan informasi terhadap output dari kebijakan tersebut. Baik yang bisa diantisipasi dan tidak diantisipasi. Evaluasi mempunyai tujuan memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, nilai menjadi target utama dalam evaluasi kebijakan.

2) Interdependensi Fakta Nilai

Kebijakan atau program dapat dikatakan baik ataupun buruk, sesuai dengan target atau tidak, dapat dilihat dari fakta dalam pelaksanaan kebijakan dan nilai yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam interdependensi fakta nilai, fakta dan nilai saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Kebijakan harus memberikan dampak yang luas dalam pelaksanaannya, tidak hanya bagi individu, kelompok ataupun masyarakat. Semua dapat menerima manfaat dari kebijakan yang dilakukan. Secara langsung, setiap evaluasi kebijakan harus didukung oleh instrument dan fasilitas pendukungnya sebagai bukti, bahwa kebijakan telah dilaksanakan secara baik dan benar.

3) Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau

Evaluasi kebijakan mempunyai orientasi masa kini dan masa lampau. Masa kini diperlukan sebagai target yang ingin dicapai. Tentunya didukung oleh aspek formulasi yang komprehensif dan konkret yang diimplementasikan dengan sumber daya manusia yang mendukung. Disertai oleh kompetensi dan daya saing yang tinggi. Sementara masa lampau adalah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan saat ini untuk menjadi lebih baik. Menjadi proses penyatuan tujuan yang diharapkan masa kini, diperlukan tujuan, serta rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan terhadap kebijakan yang akan datang.

4) Kualitas Nilai

Setiap kebijakan mempunyai tujuan ganda. Selain untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam program atau kebijakan, kebijakan juga sebagai *role model* dalam pengambilan kebijakan yang akan datang. Nilai yang terkandung di dalam kebijakan setidaknya mengandung dua nilai yang saling mendukung. Hal ini yang memungkinkan tercapainya sasaran dan tujuan kebijakan publik. Nilai-nilai yang mendasari evaluasi memiliki dua kualitas, ia dapat dianggap sebagai tujuan dan cara. Selain itu, evaluasi dapat dianggap sebagai intrinsik yaitu, perlu untuk mencapai tujuannya sendiri dan ekstrinsik yaitu, karena pencapaian tujuannya berdampak pada tujuan kegiatan lainnya.

d. Tipe Evaluasi

Langbien, dalam *Analisis Kebijakan Publik* (dalam Hayat 2018:40), membedakan tipe evaluasi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Tipe evaluasi hasil (*outcomes of public policy implementation*) yang merupakan riset yang mendasarkan diri pada tujuan kebijakan. Ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan adalah sejauh mana apa yang menjadi tujuan program dapat dicapai.
- 2) Tipe evaluasi proses (*process of public policy implementation*) yang merupakan riset evaluasi yang mendasarkan diri pada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknik (juknis). Ukuran keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan garis petunjuk (*guide lines*) yang telah ditetapkan.

Pendapat James Anderson, yang dikutip oleh Winarno (dalam Hayat 2018:43), membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe, yaitu:

- 1) Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, artinya evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembuat kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program, dan proyek-proyek.
- 2) Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang menyangkut tujuan dan operasional.

- 3) Evaluasi kebijakan sistematis. Evaluasi ini melihat secara obyektif program-program yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat seberapa jauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dapat tercapai. Lebih lanjut, evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat.

e. Tahapan Evaluasi

Evaluasi dengan menggunakan tipe sistematis atau juga sering disebut sebagai evaluasi ilmiah merupakan evaluasi yang mempunyai kemampuan lebih baik untuk menjalankan evaluasi kebijakan dibandingkan dengan tipe evaluasi yang lain. Dalam kerangka evaluasi yang baik dengan *margin kesalahan* yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi. Pall (dalam Hayat 2018:43) membagi evaluasi kebijakan kedalam empat kategori, yaitu:

- 1) *Planning and need evaluations;*
- 2) *Process evaluations;*
- 3) *Impact evaluations;*
- 4) *Efficiency evaluations.*

f. Tujuan Evaluasi

Adapun tujuan evaluasi menurut Subarsono (dalam Muhammad Nur 2025:198-199) lebih lanjut menjelaskan beberapa tujuan spesifik dari evaluasi:

- 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan: Evaluasi memungkinkan kita mengetahui sejauh mana tujuan dan sasaran kebijakan berhasil dicapai.
- 2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan: Dengan evaluasi, kita bisa menghitung biaya dan manfaat dari suatu kebijakan, memastikan penggunaan sumber daya yang efektif.
- 3) Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan: Salah satu tujuan utama evaluasi adalah mengukur seberapa besar dan kualitasnya keluaran atau output yang dihasilkan dari sebuah kebijakan.
- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan: Pada tahap yang lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak keseluruhan dari suatu kebijakan, baik itu dampak positif maupun negatif.
- 5) Untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan: Evaluasi juga berfungsi untuk mendeteksi adanya penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- 6) Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang: Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan berharga bagi proses kebijakan di masa depan, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan relevan.

g. Pendekatan Evaluasi

Adapun pendekatan evaluasi menurut Dunn (dalam Dikson Silitonga 2022:34-36), membedakan beberapa pendekatan dalam evaluasi, yaitu :

1) Evaluasi Semu

(psuedo evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasilkebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu atau kelompok masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari pendekatan ini adalah bahwa ukuran manfaatatau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (self evident) atau tidak kontroversial. Dalam evaluasi semu analisis secara khusus menerapkan macam-macam metode (rancangan eksperimental-semu, kuesioner, random sampling, teknik statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari variable masukan dan proses.

2) Evaluasi Formal

(formal evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasilkebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari pendekatan ini adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program. Dalam evaluasi formal digunakan berbagai macam metode yang sama seperti yang dipakai dalam evaluasi semu dan tujuannya adalah identik yaitu untuk

menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai variasi-variasi hasil kebijakan dan dampak yang dapat dilacak dari masukan dan proses kebijakan.

3) Evaluasi Keputusan Teoritis

(Decision-Theoritic Evaluation) adalah pendekatan dengan menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan di satu sisi, dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi atau yang dinyatakan.

2. Pedagang Kaki Lima (PKL)

a. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah jenis usaha sektor informal yang merupakan kelompok perdagangan terbesar dalam masyarakat. Kelompok ini terdiri dari golongan masyarakat ekonomi lemah dan secara struktural menduduki tempat terendah dalam strata ekonomi Indonesia yang secara makro adalah pengusaha menengah dan kecil. Namun demikian sektor informal ini lebih besar peranannya dan kontribusinya terhadap perekonomian suatu negara setidaknya turut andil dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara.

Pedagang kaki lima adalah para pedagang yang menggunakan gerobak dorong yang memiliki tiga roda. Diatas kereta dorong itulah meletakkan berbagai barang dagangannya, menyusuri pemukiman penduduk dan menjajakannya kepada orang-orang yang berminat. Dengan dua kaki pedagang kaki lima ditambah tiga roda kereta dorong itulah, mereka kemudian dikenal sebagai pedagang kaki lima.

Pedagang kaki lima adalah sebagai *hawkers* yaitu orang-orang yang menawarkan barang-barang atau jasa untuk dijual ditempat umum, terutama jalan-jalan trotoar. Pedagang kaki lima juga bisa disebut wiraswasta adalah orang yang berjiwa pejuang, gagah, luhur, berani layak menjadi teladan dalam bidang usaha dalam landasan berdiri diatas kaki sendiri.

Istilah pedagang kaki lima konon berasal dari jaman pemerintahan Raffles, Gubernur Jenderal pemerintahan Kolonial Belanda, yaitu dari kata "*five feet*" yang berarti jalur pejalan kaki dipinggir jalan selebar lima kaki. Ruang tersebut digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut dengan pedagang kaki lima.

Istilah pedagang kaki lima sudah sangat populer di negara Indonesia, dan kepopulerannya ini mempunyai arti yang positif maupun negatif. Positifnya, pedagang kaki lima secara nyata dapat memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur. Para penganggur ini kemudian berkreasi dengan menciptakan ide-ide untuk berwiraswasta diawali dengan modal sendiri walau kecil ataupun tanpa

modal. Barang yang dijual umumnya merupakan barang konvensional, yang dibeli atau dibuat secara emosional dan harga yang mereka tawarkan mula-mula sangat tinggi namun pada akhirnya dapat ditawarkan dengan harga yang relatif rendah. Dengan cara demikian, maka baik pedagang maupun pelanggan merasa sama-sama mendapatkan keuntungan. Negatifnya, Pedagang kaki lima ini umumnya tidak menghiraukan masalah ketertiban dan keamanan sehingga dapat menimbulkan ketidakrapihan. Dampak negatif inilah yang kerap menimbulkan masalah bagi pemerintah daerah ataupun kota dalam rangka penataan kota yang indah dan harmonis.

Menurut Jamaludin (dalam David Cardona, 2020:5). Beberapa ciri yang berkaitan dengan penentuan lokasi yang diminati para pedagang kaki lima yaitu:

- 1) Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama;
- 2) Berada di kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah yang besar;
- 3) Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang yang relatif sempit;
- 4) Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika menurut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat murah dari pada harga di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga mengundang pedagang yang ingin memulai bisnis dengan modal kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasanya mendirikan bisnisnya di sekitar rumah mereka.

b. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima (PKL)

Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima (PKL) ialah:

- 1) Kegiatan usaha, tidak terorganisir secara baik.
- 2) Tidak memiliki surat izin usaha
- 3) Tidak teratur dalam kegiatan usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja
- 4) Bergerombol di trotoar, atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat dimana banyak orang ramai
- 5) Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.

c. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa karakteristik pedagang kaki lima. Adapun karakteristik tersebut adalah:

- 1) Kelompok pedagang yang kadang sebagai produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri.
- 2) Umumnya pedagang kaki lima menjajakan barang dagangan nya pada gelaran tikar dipinggir jalan di depan toko yang dianggap strategis, ada juga pedagang yang menggunakan meja, kereta dorong dan kios kecil.
- 3) Pedagang kaki lima umumnya menjual barang secara eceran.
- 4) Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil, bahkan sering dimanfaatkan pemilik modal dengan memberikan komisi sebagai jerih payah.
- 5) Pada umumnya pedagang kaki lima adalah kelompok marginal maupun yang masuk ke dalam kelompok sub-marginal.
- 6) Pada umumnya barang yang dijual memiliki kualitas yang relatif rendah, bahkan ada yang khusus menjual barang dengan kondisi sedikit cacat dengan harga yang lebih murah.
- 7) Omzet penjualan pedagang kaki lima pada umumnya tidak besar.
- 8) Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah.
- 9) Jarang ditemukan kasus pedagang kaki lima yang sukses secara ekonomi, sehingga kemudian meningkat dalam jenjang hirarki pedagang.

- 10) Pada umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha “*family enterprise*” dimana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut.
- 11) Pedagang kaki lima memiliki sifat “*one man enterprise*”
- 12) Barang ditawarkan oleh pedagang kaki lima biasanya tidak berstandar, dan perubahan jenis barang yang diperdagangkan sering terjadi.
- 13) Tawar menawar antara pembeli dan pedagang merupakan ciri khas dari usaha pedagang kaki lima.
- 14) Sebagian pedagang kaki lima melaksanakan usaha secara penuh yaitu berupa “*full time job*”, sebagian lagi melakukannya setelah jam kerja, atau pada waktu senggang dalam rangka usaha untuk mencapai pendapatan tertentu.
- 15) Sebagian pedagang kaki lima melakukan pekerjaannya secara musiman, dan sering kali terlihat jenis barang yang diperdagangkan berubah-ubah.
- 16) Barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima biasanya merupakan barang umum, dan sangat jarang PKL menjual barang khusus.
- 17) Umumnya pedagang kaki lima berdagang dalam kondisi tidak tenang, karena takut sewaktu-waktu usaha mereka ditertibkan dan dihentikan oleh pihak berwenang.

- 18) Masyarakat sering beranggapan bahwa pedagang kaki lima adalah kelompok yang menduduki status sosial yang rendah dalam masyarakat.
- 19) Mengingat adanya faktor pertentangan kepentingan, kelompok pedagang kaki lima adalah kelompok yang sulit bersatu dalam bidang ekonomi meskipun perasaan setia kawan yang kuat diantara mereka.
- 20) Umumnya waktu kerja pedagang kaki lima tidak memiliki pola yang tetap, hal ini menunjukkan seperti pada ciri perusahaan perorangan.
- 21) Pedagang kaki lima memiliki jiwa “*entrepreneurship*” yang kuat.

3. Pasar

a. Pengertian Pasar

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, terjadi transaksi, serta pertukaran produk (barang/jasa) yang bernilai antara dua belah pihak atau lebih. Istilah pasar saat ini bukan lagi mengacu kepada suatu tempat secara fisik, namun lebih kepada sekumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk atau kelas produk tertentu. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan itu. Pasar adalah sekelompok pembeli potensial yang memiliki berbagai kebutuhan dan keinginan yang spesifik, serta daya beli yang dengan kebutuhan dan keinginan tersebut dapat dipenuhi melalui pertukaran barang atau jasa.

Melalui interaksi yang berlangsung, pasar berfungsi untuk menentukan harga berdasarkan mekanisme tawar-menawar antara penawaran dan permintaan, sekaligus mengatur alokasi sumber daya secara efisien agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Selain sebagai pusat transaksi ekonomi, pasar juga memiliki peran sosial yang tidak kalah penting, yaitu sebagai tempat bertemunya berbagai lapisan masyarakat untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan sosial yang memperkuat jaringan komunitas. Dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, pasar kini tidak hanya beroperasi dalam batas-batas geografis tertentu, tetapi juga dapat menjangkau berbagai daerah dan bahkan negara, sehingga memperluas peluang dan tantangan dalam kegiatan ekonomi modern. Pasar dapat menunjukkan pada:

1) Orang

Karena pertukaran melibatkan dua atau lebih orang, wajar untuk memikirkan pasar sebagai orang, individu, atau kelompok. Jelas, tanpa adanya orang untuk membeli dan mengonsumsi barang, jasa, dan gagasan, tidak akan ada sedikit alasan untuk pemasaran.

2) Sebuah tempat

Berpikir tentang pasar sebagai tempat “pasar” adalah praktik yang banyak dilakukan pada masyarakat umum. Lokasi seperti itu memang ada karena wilayah geografis dimana perdagangan terjadi. Contohnya pasar dunia, pasar internasional, negara, kota atau desa.

3) Sebuah entitas ekonomi

Dalam kebanyakan kasus, pasar ditandai oleh sistem kekuatan ekonomi yang dinamis. Keempat kekuatan ekonomi yang paling menonjol adalah penawaran, permintaan, persaingan dan intervensi pemerintah. Istilah pasar pembeli dan pasar penjual menggambarkan berbagai kondisi kekuatan tawar menawar.

b. Fungsi Pasar

1) Fungsi Distribusi

Pasar dapat memberikan sumbangan untuk memperlancar pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen. Melalui pasar, produsen dapat berhubungan dengan konsumen dalam menyalurkan barang langsung maupun tidak langsung.

2) Fungsi Promosi

Melalui pasar, pihak produsen dapat mempromosikan barang hasil produksinya kepada calon konsumen dan masyarakat luas.

3) Fungsi Pembentuk Harga

Pasar berfungsi sebagai pembentuk harga pasar, yaitu kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.

c. Bentuk-bentuk Pasar

1) Bentuk Pasar Berdasarkan Jenis Barang Yang Diperjual belikan (Pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi)

2) Bentuk Pasar Berdasarkan Sifatnya (Pasar konkret pasar abstrak)

3) Bentuk Pasar Berdasarkan Hubungannya Dengan Proses Produksi (Pasar produk dan pasar faktor produksi)

- 4) Bentuk pasar berdasarkan luas jangkauannya (Pasar lokal, nasional, regional dan internasional)
- 5) Bentuk pasar berdasarkan waktu terjadinya (Pasar harian, mingguan, bulanan, tahunan dan temporer)
- 6) Bentuk pasar berdasarkan bentuk transaksi nya (Pasar tradisional dan pasar modern)

d. Ciri-ciri Pasar

Beberapa ciri-ciri pasar, antara lain:

- 1) Terdapat calon pembeli dan penjual.
- 2) Terdapat jasa ataupun barang yang hendak untuk diperjualbelikan.
- 3) Terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua belah pihak.

e. Struktur Pasar

1) Pasar Persaingan Sempurna

Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar dimana banyak pembeli dan penjual tidak mampu mempengaruhi pasar.

2) Pasar Monopoli

Pasar monopoli merupakan struktur pasar dimana hanya ada satu penjual dan tidak ada industry yang memproduksi produk substitusi yang mirip, sehingga tidak ada yang menyaingi.

3) Pasar Oligopoli

Pasar oligopoli adalah struktur pasar yang terdapat sedikit perusahaan saja, menjual produknya yang identik satu sama lain.

4) Pasar Persaingan Monopolistik

Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang terjadi bila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen, tetapi ada diferensiasi produk (perbedaan merek, bungkus, dan sebagainya) diantara produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen.

H. Kerangka Pemikiran

Dalam menyusun kerangka pemikiran, penyajian dimulai dari variabel yang mewakili masalah penelitian. Jika yang hendak diteliti adalah masalah kinerja pegawai dalam hubungannya dengan motivasi dan kompensasi, maka penyajiannya dimulai dari teori kinerja lalu dikaitkan dengan teori motivasi. Keterkaitan dua variabel tersebut sedapat mungkin dilengkapi dengan teori atau penelitian terdahulu yang dilakukan atau dipengaruhi oleh keduanya.

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti.

Penelitian ini memfokuskan Pasar Candi di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara dilihat dari teori William Dunn (dalam Firyal Akbar, 2018:18).

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

